

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan kontrak kerja antara *principal* (para pemegang saham) dengan *agent* (pihak manajemen suatu perusahaan). *Principal* adalah pihak yang memberikan tugas atau wejangan kepada *agent* dalam menjalankan aktivitas perusahaan atas nama *principal* dan mengevaluasi informasi atas laporan keuangan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976), sedangkan *agent* adalah pihak yang diberi tugas atau wejangan agar berperilaku sebagai pihak yang akan menentukan keputusan-keputusan yang terbaik bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Masalah yang terjadi di dalam teori keagenan diakibatkan karena timbulnya *information asymmetry* antara pihak *agent* yang lebih menguasai informasi perusahaan dibandingkan pihak *principal*. Asimetris informasi diartikan sebagai ketidakseimbangan informasi akibat pembagian informasi yang tidak sama antara *agen* dengan *principal*. Perbedaan kepentingan antar keduanya sehingga menyebabkan agen bisa menyalahgunakan kewajibannya dalam menyampaikan informasi kepada *principal* dengan cara membatasi pemberian informasi yang dibutuhkan *principal* apabila menguntungkan bagi agen. Manajemen sebagai pihak *agent* memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga melakukan tindakan merekayasa atas informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Merekayasa laporan keuangan dengan

menyembunyikan, penundaan pengungkapan atau mengubah informasi yang ada pada laporan keuangan yang menuju pada tindakan *fraud* yang dilakukan *agent* terhadap *principal*.

Dalam konteks agensi, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa pengungkapan yang lebih besar mengurangi ketidakpastian yang dihadapi dan dengan demikian dapat mengurangi biaya modal perusahaan. Manajer harus bersedia untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan penilaian posisi keuangan perusahaan yang lebih baik kepada investor dan membantu mengurangi volatilitas pengembalian saham (Li *et al*, 2008). Untuk meminimalkan terjadinya *agency conflict* antara *principal* dengan *agent*, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen dan salah satu faktor yang berperan dominan adalah keberadaan komite audit.

Komite audit dianggap sebagai elemen yang penting dalam menjamin kualitas pengungkapan informasi karena komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan non keuangan sebagai salah satunya adalah penelaahan atas informasi *intellectual capital*.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari sebuah proses pelaporan keuangan. Menurut Standart Akuntansi Indonesia (SAK), tujuan adanya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan

perusahaan, dan arus kas entitas yang akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan ekonomi dan bisnis. Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap harus terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyebutkan ada empat karakteristik kualitatif di dalam laporan keuangan yaitu:

1. Dapat dipahami (*Understandability*)

Informasi laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang telah disajikan di dalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan diperkirakan memiliki pengetahuan mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi, akuntansi, serta ada keinginan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan (*Relevance*)

Dalam pengambilan sebuah keputusan bagi pengguna laporan keuangan harus mempunyai kualitas informasi yang relevan agar dapat mempengaruhi keputusan ekonomi nantinya serta mengevaluasi akan peristiwa masa lalu, masa kini maupun di masa depan.

3. Keandalan (*Reliability*)

Informasi yang baik harus andal agar bebas dari pengertian yang menyesatkan pengguna laporan keuangan, agar terhindar dari salah saji

material serta penyajian laporan keuangan dapat bersifat jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak ada unsur manipulasi.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi terjadinya kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta mampu memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan dalam mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

2.3 Aset Tak Berwujud

Pernyataan Standart Akuntansi Indonesia (PSAK) 19, yang menyatakan bahwa aset tak berwujud merupakan “aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik”. Di dalam PSAK 19 aset tak berwujud harus memiliki tiga kriteria yaitu (IAI, 2018):

1. Keteridentifikasian

Suatu aset dikatakan teridentifikasi apabila :

- a. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, diahlikan, dilisensikan, disewakan, baik secara individual maupun bersama dengan kontrak yang terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut.
- b. Timbul dari hak kontraktual atau hukum lain, terlepas apakah dapat diahlikan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

2. Adanya pengendalian terhadap sumber daya

Entitas seing kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses yang baru. Lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan akan pasar dan merek dagang. Contohnya, piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, pangsa pasar dan hak pemasaran.

Entitas mengendalikan aset apabila entitas memiliki kemampuan dalam memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Manfaat ekonomi masa depan timbul dari pengetahuan atas pasar atau teknis. Usaha yang dilakukan entitas untuk membina hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas pelaggan, entititas mungkin memiliki portofolio pelanggan yang setia yang akan terus melkukan transaksi dengan entitas atau entitas berhasil menguasai pengsa pasar tertentu.

Namun, apabila tidak ada hal legal untuk melindungi atau mngendalikan hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan, maka entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari hubungan dengan pelanggan. Walaupun entitas tidak memiliki hak hukum untuk melindungi hubungan pelanggan, namun jika ada transaksi pertukaran hubungan pelanggan nonkontraktual yang sama atau serupa, maka

hal ini memberikan bukti bahwa entitas mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomi masa depan dari hubungan tersebut. Transaksi pertukaran tersebut juga membuktikan bahwa hubungan pelanggan dapat dipisahkan, maka hubungan pelanggan ini memenuhi definisi aset tak berwujud.

3. Memiliki manfaat ekonomi dimasa depan

Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan tetapi mengurangi biaya produksi masa depan.

2.4 *Intellectual Capital*

Menurut Stewart (1998) bahwa *intellectual capital* merupakan bagian dari aset bersifat tidak berwujud yang mendefinisikan *intellectual capital* adalah sebuah materi intelektual yang berisi tentang pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan. Dengan demikian, *intellectual capital* dapat di defenisikan yaitu suatu aktiva yang tidak berwujud yang berbasis sumber daya pengetahuan, teknologi informasi, kekayaan intelektual yang akan berdampak pada kinerja dan keberhasilan bisnis, mampu memberikan keunggulan bersaing dan mampu menciptakan kekayaan perusahaan.

2.4.1. Komponen *Intellectual Capital*

Komponen dari *intellectual capital* dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan keberhasilan bisnis perusahaan. Ilmu taksonomi dari *Huber Saint-Onge* dari *Canadian Imperial Bank of Commerce* and *Leif Edvinsson* dari Skandia dalam Stewart (1998), membagi *intellectual capital* menjadi tiga komponen yaitu:

1. *Human Capital*

Human capital adalah “kemampuan individu yang dibutuhkan untuk menyediakan solusi kepada pelanggan” (Stewart, 1998). *Human capital* bersumber dari inovasi, wawasan, bakat yang dimiliki orang-orang yang berkerja dalam perusahaan. Dengan demikian, *human capital* adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan solusi yang terbaik berdasarkan dari segi pengetahuan, kompetensi, keterampilan, bakat dan keahlian yang dimiliki karyawan perusahaannya. Melalui daya pikir apa yang diketahui karyawannya serta adanya kontribusi dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan, *intellectual capital* akan terbentuk dan memberikan keunggulan pada perusahaan. *Intellectual capital* diukur dari *human capital* seperti, jumlah karyawan, umur karyawan, pendidikan karyawan, pelatihan, kompetensi, keterampilan, pengalaman karyawan dan sebagainya.

2. *Relational Capital*

Relational capital adalah nilai dari hubungan organisasi perusahaan dengan orang-orang yang berbisnis dengannya (Stewart, 1998). *Relation capital* memiliki hubungan antara perusahaan dengan pihak dari luar lingkungan

perusahaan baik pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Indikator *relational capital* meliputi pangsa pasar, *brands*, tingkat retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, kerja sama bisnis, penghargaan perusahaan dan sebagainya.

3. *Structural Capital*

Structural capital meliputi apa yang karyawan atau orang-orang perusahaan ketahui dan memberikannya kepada para pelanggan perusahaan. Dalam mengembangkan dan mendukung ide tersebut diperlukan sumber daya manusia atau pengembangan baru organisasi yang tersedia dalam perusahaan (Stewart, 1998). Menurut Sitohang (2019), *structural capital* adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan aktivitas kinerja perusahaan yang didukung pada struktur dan operasi yang berhubungan dengan usaha dari ide dan pengetahuan karyawan dalam menciptakan kinerja intelektual perusahaan yang lebih optimal.

Structural capital berkaitan dengan kekayaan intelektual perusahaan yang meliputi hak cipta, hak paten, penemuan, merek dagang, strategi, filosofi manajemen, profil organisasi, teknologi, inovasi, *networking* dan budaya perusahaan. Apabila organisasi perusahaan memiliki sistem dan prosedur yang buruk di perusahaanya maka, *intellectual capital* tidak dapat menciptakan kinerja yang optimal dan potensi yang ada tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

2.5 Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Chariri dan Ghozali (2005), pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan memiliki makna bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai setiap aktivitas suatu unit usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan demikian, informasi yang disajikan harus lengkap, jelas dan menggambarkan yang sebenarnya karena akan mempengaruhi bisnis usaha yang dijalankan.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Menurut Suwardjono (2008), pengungkapan diwajibkan untuk:

1 Tujuan Melindungi

Pengungkapan yang dimaksudkan adalah untuk melindungi perlakuan manajemen yang kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi (Suwardjono, 2008). Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal Badan Pengawas Pasar Modal.

2 Tujuan Informatif

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai (Suwardjono, 2008).

3 Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada pengawas (Suwardjono, 2008).

2.6 Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan terdiri dari dua aspek yaitu pengungkapan bersifat wajib (*mandatory disclosure*) yang didasarkan pada aturan dan standart tertentu yang berlaku dan pengungkapan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) dimana pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan diluar peraturan standart akuntansi yang berlaku atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2008). Pengungkapan informasi *intellectual capital* dalam laporan tahunan perusahaan bersifat sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas bagi manajemen untuk mengungkapkan informasi secara terbuka yang melebihi yang diwajibkan untuk diungkapkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan di masa depan.

Pengungkapan informasi yang memadai diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga mengurangi terjadi asimetri informasi yang berkaitan dengan tujuan pengungkapan untuk melindungi dari perlakuan manajemen yang kurang adil dan pengungkapan informasi dapat mengambil keputusan secara optimal. Menurut

Suwardjono (2008), Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati para investor khususnya apabila informasi yang disampaikan merupakan berita baik (*good news*).

Menurut Subramanyam dan Wild (2009), juga mengatakan bahwa pengungkapan informasi secara sukarela oleh perusahaan baik informasi keuangan maupun non-keuangan dilakukan dengan motivasi dalam memberikan sinyal atau tanda dimana manajer dianggap mengungkapkan berita baik untuk meningkatkan harga saham perusahaan mereka. Dengan demikian, manajemen berminat menyampaikan pengungkapan informasi dalam meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan walaupun informasi yang disampaikan tidak diwajibkan untuk diungkapkan.

2.7 Komite Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015, “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perseroan yang terkait dengan penelaahan atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab komite audit secara garis besar adalah memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada dewan komisaris atas laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan

komisaris. Berdasarkan hal tersebut, tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain adalah:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan manajemen dan akuntan publik atau tim audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
5. Bersama-sama dengan manajemen dan auditor eksternal melakukan penelaahan atas hasil-hasil audit termasuk kendala yang dihadapi.
6. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

2.8 Karakteristik Komite Audit

Berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, pada pasal 2 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Dalam Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015, ada persyaratan yang harus dimiliki komite audit didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel independen untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital* pada perusahaan *high-IC intensive industry*. Karakteristik komite audit ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

2.8.1. Ukuran Komite Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan dari pihak luar perusahaan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

2.8.2. Pertemuan Rapat Komite Audit

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dalam ketentuan penyelenggaraan pertemuan rapat komite audit, Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan mengadakan rapat komite audit secara berskala paling sedikit satu dalam tiga bulan yang harus diselenggarakan lebih dari setengah jumlah anggota.

Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat yang sudah disepakati dalam rapat komite audit.

2.8.3. Keahlian Keuangan Komite Audit

Keahlian adalah kemampuan yang harus dimiliki akan pemahaman yang memadai tentang keuangan, audit dan sistem yang berlaku di dalam perusahaan. Dalam hal keahlian keuangan yang harus dimiliki komite audit, Otoritas Jasa Keuangan (2015), membuat peraturan persyaratan menjadi anggota komite audit adalah wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman serta keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, wajib memiliki integritas yang tinggi, serta sebagai komite audit harus bisa memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan dengan baik.

2.9 Kelompok Industri

Global industry classification standart (GICS) yang merupakan taksonomi industri yang dikembangkan pada tahun 1999 oleh *Morgan Stanley Capital International (MSCI)* dan *Standart and Poors (S&P)* yang menggolompokkan industri menjadi dua tipe yaitu *high-IC intensive industry* dan *low-IC intensive industry* (Woodcock dan Whiting, 2009). Menurut GICS, perusahaan yang termasuk kedalam *high-IC intensive industry* merupakan perusahaan yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan aset intelektualnya dengan baik dalam menciptakan keunggulan kompetitif dalam melakukan persaingan dimasa depan (Abdiani dan Nugrahanti, 2014).

Perusahaan yang tergolong *high-IC intensive industry* pada dasarnya berupa perusahaan yang berbasis pengetahuan dimana perusahaannya memiliki komunitas yang memiliki pengetahuan, teknologi, keahlian serta memiliki daya inovasi yang tinggi dan kemampuan *problem solving* yang tinggi sedangkan *low-IC intensive industry* merupakan perusahaan yang lebih memanfaatkan sumber daya alam dan masih menerapkan sistem tradisional (Abdiani dan Nugrahanti, 2014). Perusahaan yang termasuk dalam *high-IC intensive industry* akan memiliki tingkat pengungkapan *intellectual capital* lebih tinggi di dalam laporan tahunan daripada perusahaan yang tergolong *low-IC intensive industry*. Berikut daftar klasifikasi perusahaan yang tergolong dalam perusahaan *high-IC* dan *low-IC*:

Tabel 2.1
Daftar perusahaan yang tergolong *high-IC intensive industry* dan *low-IC intensive industry*

<i>High-IC intensive industry</i>	<i>Low-IC intensive industry</i>
<i>Automobile and components</i>	<i>Commercial services and supplies</i>
<i>Banks</i>	<i>Consumer durables and apparels</i>
<i>Capital Goods</i>	<i>Consumer service</i>
<i>Commercial services and supplies</i>	<i>Energy</i>
<i>Consumer service</i>	<i>Food, beverage and retailing</i>
<i>Diversified financials</i>	<i>Materials</i>
<i>Health care equipment and services</i>	<i>Retail</i>
<i>Insurance</i>	<i>Transportation</i>
<i>Media</i>	<i>Utilities</i>
<i>Pharmaceutical, biotechnology, and life science</i>	
<i>Real estate</i>	
<i>Semi conductors and semi conductors equipment</i>	
<i>Software and services</i>	
<i>Technology, hardware and equipment</i>	
<i>Telecommunication service</i>	

Sumber: Woodcock and Whiting (2009)

2.10 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun negara-negara lain mengenai *intellectual capital* dengan adanya kesamaan dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2012) mengenai karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham oleh komite audit dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* dengan penggunaan sampel 100 perusahaan yang telah terdaftar di *London Stock Exchange* (LSE) tahun 2008. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan positif antara ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* sedangkan untuk kepemilikan saham oleh komite audit memiliki hubungan negatif terhadap *intellectual capital disclosure*. Independensi dan keahlian keuangan yang dimiliki komite audit tidak memiliki hubungan dengan *intellectual capital disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Haji (2015) melakukan penelitian di tujuh sektor industri dengan sampel 51 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang meliputi ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit dan jumlah pertemuan komite audit yang hasil penelitiannya semua berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Buallay (2018) dengan menggunakan sampel pada perusahaan sektor Bank yang terdaftar di *GCC Stock exchange*

(Bahrain, Kuwait, UAE, Oman, Qatar, Arab Saudi) tahun 2011-2015 mengenai karakteristik komite audit yang terdiri dari keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan independensi komite audit yang menghasilkan pengaruh positif pada *intellectual capital disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Uzliawati *et al* (2014) mengenai karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit, independensi, jumlah pertemuan, latar belakang pendidikan, jumlah anggota perempuan dan keahlian keuangan komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* dengan menggunakan sampel perusahaan sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah pertemuan dan jumlah anggota perempuan terhadap *intellectual capital disclosure* sedangkan ukuran, independensi, latar belakang, dan keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sinaga (2015) pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 yang mengenai karakteristik komite audit terhadap pengungkapan *intellectual Capital*. Hasil penelitian menunjukkan hanya ukuran komite audit dan keahlian keuangan yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital* sedangkan jumlah rapat komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Objek	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Li et al (2012)	<i>The effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure</i>	Perusahaan 7 sektor industri yang terdaftar di <i>London Stock Exchange</i> (LSE) tahun 2008.	Variabel dependen: <i>Intellectual capital disclosure</i> Variabel independen: Ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham oleh komite audit, keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit.	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>intellectual capital disclosure</i>. - Kepemilikan saham oleh komite audit memiliki hubungan negatif terhadap <i>intellectual capital disclosure</i>. - Independensi dan keahlian keuangan yang dimiliki komite audit tidak memiliki hubungan dengan <i>intellectual capital disclosure</i>

2	Haji (2015)	<i>The Role of audit committee attributes in intellectual capital disclosure :Evidence from Malaysia.</i>	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2008-2010.	Variabel dependen: <i>intellectual capital disclosure</i> Variabel Independen: ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, jumlah pertemuan komite audit.	Ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>intellectual capital disclosure</i> .
3	Buallay (2018)	<i>Audit committee characteristics: an empirical investigation of the contribution to intellectual capital efficiency.</i>	Perusahaan sektor Bank yang terdaftar di GCC <i>Stock Exchange</i> (Bahrain, Kuwait, UAE, Oman, Qatar, Arab Saudi) tahun 2011-2015.	Variabel dependen: <i>intellectual capital</i> Variabel independen: keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi komite audit.	Keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap <i>intellectual capital</i> .
4	Uzliawati et al (2014)	<i>The characteristics of Audit committee and intellectual capital disclosure in Indonesia Banking Industry.</i>	Perusahaan sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011.	Variabel dependen: <i>intellectual capital disclosure</i> Variabel independen: ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, latar belakang pendidikan, jumlah anggota perempuan dan keahlian keuangan komite audit.	- Jumlah pertemuan dan jumlah anggota perempuan berpengaruh positif terhadap <i>intellectual capital disclosure</i> - Ukuran, independensi, latar belakang, dan keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>intellectual capital disclosure</i> .

5	Sinaga (2015)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan <i>intellectual Capital</i> .	Seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013.	Variabel dependen: pengungkapan <i>intellectual capital</i> Variabel independen: Ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit dan keahlian keuangan komite audit.	- Ukuran komite audit dan keahlian keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> - Jumlah rapat komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> .
---	---------------	---	--	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2019

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital*

Agar komite audit dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya lebih efektif, maka komite audit harus memiliki setidaknya sumber daya yang memadai dan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka meningkat (FRC, 2008 dalam Li *et al* 2012). Menurut Bedard *et al* (2004) dalam Li *et al* (2012), berpendapat bahwa semakin besar komite audit, semakin besar untuk semakin mudah mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih terbuka dan melakukan pengungkapan lebih besar seperti pengungkapan atas *intellectual capital* yang lebih banyak di laporan tahunan. Menurut Jensen (1993) dalam Haji (2015), jumlah anggota yang lebih banyak akan semakin cepat dalam menyelesaikan masalah potensi yang ada dalam proses pelaporan keuangan

melalui kekuatan dan keberagaman pendapat dari masing-masing anggota komite audit agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin relevan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang disajikan dan semakin mudah melakukan penelaahaan atas pengungkapan informasi *intellectual capital*. Penjelasan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2012), Haji (2015) dan Buallay (2018) bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*. Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu hipotesis:

H1: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital*.

2.11.2. Pengaruh pertemuan rapat komite audit terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital*

Komite audit yang lebih sering mengadakan pertemuan rapat dan sering hadir dalam mengikuti rapat akan lebih banyak waktu untuk melakukan pemantauan proses pelaporan keuangan yang lebih efisien (Karamanou dan Vafeas, 2005 dalam Li *et al*, 2012). Lebih sering mengadakan pertemuan rapat komite audit akan lebih aktif dan memiliki banyak kesempatan untuk mengawasi setiap tindakan dan perilaku manajemen sehingga semakin mudah untuk mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi *intellectual capital* lebih banyak dan terbuka akan informasi dalam hal mengurangi terjadinya masalah asimetris informasi antar manajemen dengan pihak eksternal dengan

pertemuan rapat secara rutin yang dilakukan oleh komite audit. Pertemuan rapat komite audit akan sering mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen dalam hal penelaahan atas evaluasi informasi *intellectual capital* yang akan dikeluarkan perusahaan. Apabila komite audit tidak aktif untuk memonitor dan mengawasi manajemen secara efektif maka akan semakin sulit untuk mendeteksi penipuan atau semakin besar terjadinya penyimpangan dan manipulasi atas informasi *intellectual capital*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, komite audit harus mengadakan rapat secara berskala paling sedikit satu dalam tiga bulan yang harus diselenggarakan lebih dari setengah jumlah anggota. Dengan demikian, pertemuan rapat audit yang lebih sering akan mempunyai pengaruh lebih besar dalam mengatur praktik pengungkapan informasi *intellectual capital*. Li *et al* (2012), Haji (2015), Buallay (2018), Uzliawati *et al* (2014) dan Sinaga (2015) membuktikan bahwa ada hubungan positif antara pertemuan rapat komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*. Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu hipotesis:

H2: Pertemuan rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital*.

2.11.3. Pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital*

Komite audit yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan dalam perusahaan antara lain menelaah

seluruh informasi keuangan perusahaan, menilai kinerja atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, seraf mengevaluasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan dan manipulasi informasi di laporan keuangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 mensyaratkan anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, sehingga anggota komite audit harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi maupun keuangan. Komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, keahlian dan pengalaman di bidang keuangan akan lebih mudah untuk memahami setiap implikasi informasi *intellectual capital* baik keuangan maupun non-keuangan pada laporan tahunan yang dibuat manajemen sehingga informasi *intellectual capital* yang diungkapkan akan berkualitas (Li *et al*, 2012).

Menurut Knapp (1987) dalam Li *et al* (2012), jika komite audit tidak memiliki keahlian untuk memahami audit teknis dan masalah pelaporan keuangan perusahaan maka peran pengawasannya cenderung akan diabaikan oleh auditor dan manajemen. Penelitian ini didukung oleh Haji (2015) dan Buallay (2018) yang membuktikan bahwa keahlian keuangan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Dari penjabaran tersebut dapat ditarik hipotesis:

H3: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *intellectual capital*.